



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUGUH HARJANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 648931

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.203.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/216 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Tanah Seluas 323 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Tanah Seluas 251 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 753.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 957.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000



3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 495.000.000
5. LAINNYA, AIRMAN PDS 400S Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	45.120.100
F. HARTA LAINNYA	Rp.	91.000.000
Sub Total	Rp.	5.309.120.100
III. HUTANG	Rp.	240.332.683
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.068.787.417

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.